

**PENGARUH PENGELOUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007-2011****Tommy Prio Haryanto** 

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel*Sejarah Artikel:*

Diterima Juli 2013

Disetujui Juli 2013

Dipublikasikan Agustus 2013

*Keywords:**Economic Growth,
Government Expenditures.
Pertumbuhan, Ekonomi,
Pengeluaran Pemerintah,
Kab/Kota, Jawa Tengah***Abstrak**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menandakan bahwa suatu daerah memiliki kesejahteraan masyarakat yang baik. Untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut diperlukan peran pemerintah, yaitu dengan melakukan pengeluaran pemerintah. Namun, masih banyak kabupaten/kota di Jawa Tengah yang belum bisa memanfaatkan pengeluaran pemerintah yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel independen yang digunakan belanja tidak langsung dan belanja langsung, sedangkan variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian ini adalah koefisien positif dari belanja tidak langsung adalah 0.291399 yang berarti jika belanja tidak langsung naik 1 % maka pertumbuhan ekonomi naik 0.291399%. Koefisien positif dari belanja langsung sebesar 0.117470 yang berarti jika belanja langsung naik 1 % maka pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,117470%. Belanja tidak langsung dan belanja langsung secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Abstract

The high economic growth indicates that an area has good public prosperity. To get the high economic growth required the maximum role of government, by government expenditure. However, there are still many regencies/cities in Central Java that can not take the advantages of government expenditure to increase economic growth. Purpose of this research is to analyzed the influence of government expenditure on economic growth. The independent variable used are is indirect expenditure and direct expenditure, while the dependent variable is economic growth. The results of this research are positive coefficients of indirect expenditure is 0.291399 which means that if the indirect expenditure rose 1%, economic growth rose 0.291399%. Positive coefficients of direct expenditures of 0.117470, which means if direct expenditure rose 1%, the economy expanded at 0.117470%. Indirect expenditures and direct expenditures jointly effect economic growth.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

 Alamat korespondensi:Kampus Gedung C-6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang
Telp/Fax: (024) 8508015, email: Tommy_fabregas04@yahoo.co.id

ISSN 2252-6889

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suku bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi di samping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas (Irawan dan Suparmoko, 1992). Secara umum pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, menjaga keseimbangan ekonomi negara dan pendistribusian pendapatan yang merata. Adanya pembangunan ekonomi bisa jadi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka kesejahteraan masyarakat akan terlihat jelas, karena tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada.

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Selama tahun 2007-2011 PDB di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Dari seluruh pulau yang ada di Indonesia, Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang memiliki sumbangsih terbesar terhadap PDB nasional. Pada tahun 2007 Pulau Jawa menyumbang kontribusi terhadap PDB sebesar 58,2%. Namun, pada tahun 2008 kontribusinya menurun menjadi 57,9%. Setelah itu, kontribusinya meningkat lagi pada tahun 2009 menjadi 58,6 %. Lalu berturut-turut kontribusi Pulau Jawa kembali menurun tahun 2010 sebesar 58,1 %, dan tahun 2011 sebesar 57,6 % (BPS, 2012). Tingginya persentase kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB ini berkat angka pertumbuhan ekonomi di tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri belum bisa memberikan kontribusi maksimal bagi Pulau Jawa.

Tabel 1

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2007-2011 (Dalam persen)

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011
DKI Jakarta	6,44	6,23	5,02	6,51	6,70
DI Yogyakarta	4,31	5,03	4,43	4,87	5,17
Jawa Barat	6,48	6,21	4,19	6,09	6,60
Banten	6,04	22,53	4,69	5,94	6,59
Jawa Tengah	5,59	5,61	5,14	5,84	6,01
Jawa Timur	6,11	6,16	5,01	6,68	7,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2012

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi keenam provinsi di Pulau Jawa selama tahun 2007-2011 ini cenderung fluktuatif. Terutama pada tahun 2009 semua provinsi di Pulau Jawa menunjukkan penurunan dalam hal pertumbuhan ekonominya. Sementara itu, untuk Jawa Tengah yang memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,59% dan 5,61% masing-masing pada tahun 2007 dan 2008, kemudian 5,14% pada tahun 2009, dan 5,84% tahun 2010, serta 6,01% tahun 2011 masih dikatakan rendah dan menduduki peringkat 5 pada tahun 2011

setelah Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Padahal pada tahun 2009 Jawa Tengah pernah menduduki peringkat pertama dibanding dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa dalam hal pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,14% dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yang dapat memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ini, sama dengan keadaan pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang masih

tergolong rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Meskipun cenderung meningkat tapi pengeluaran yang

dilakukan Pemerintah Jawa Tengah masih rendah. Rendahnya pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2
Realisasi Total Pengeluaran Pemerintah 6 Provinsi Di Pulau Jawa
Tahun 2007-2011 (Dalam Jutaan Rupiah)

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011
DKI Jakarta	17.284.147	20.522.522	22.139.467	24.285.347	27.875.807
DI Yogyakarta	1.072.553	1.485.949	1.412.048	1.394.446	1.590.786
Jawa Barat	3.821.502	6.050.017	8.262.579	9.560.557	9.887.011
Banten	1.785.517	2.154.355	2.366.616	2.511.267	3.485.295
Jawa Tengah	4.039.935	5.296.165	5.368.714	5.665.316	6.062.150
Jawa Timur	4.928.944	6.111.296	6.314.056	7.826.710	10.626.361

Sumber : www.dpjk.depkeu.go.id

Berdasarkan pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2007-2011 pengeluaran yang dilakukan pemerintah seluruh provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan, kecuali provinsi DI Yogyakarta yang mengalami penurunan selama tahun 2008-2010. Provinsi Jawa Tengah masih menempati peringkat 4 terbesar dalam pengeluaran pemerintah selama tahun 2007-2011. Tapi besarnya pengeluaran pemerintah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum bisa mengangkat tingkat pertumbuhan ekonominya. Berbeda dengan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka selama tahun 2007-2011 dengan melakukan pengeluaran yang rendah. Padahal Provinsi Banten tergolong provinsi yang masih muda. Ini menandakan bahwa usaha Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kurang maksimal, dengan masih rendahnya pengeluaran yang dikeluarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Belum mampunya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disebabkan oleh ketidakstabilan keadaan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi cenderung stabil dari tahun 2007-2011. Dari yang harusnya mengalami peningkatan tapi terdapat kabupaten/kota yang mengalami penurunan pada periode tahun 2007-2011.

Jika pertumbuhan ekonomi pada masing-masing Kabupaten/Kota dibandingkan dengan pengeluaran pemerintahnya masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2007-2011, ternyata terdapat 33 Kabupaten/Kota yang peningkatan pengeluaran pemerintahnya tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kemudian hanya 2 Kabupaten lainnya pengeluaran pemerintah yang dilakukan sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah mereka yaitu Kabupaten Kendal dan Kabupaten Kudus. Selama periode 2007-2011, terdapat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki pengeluaran pemerintah yang tinggi tapi tidak bisa meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan dalam perjalannya cenderung fluktuatif. Ketidakselarasan antara pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menjadi masalah dalam penelitian ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut P. Eko Prasetyo (2009), istilah pertumbuhan ekonomi (economic growth) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu misalkan satu tahun. Sedangkan menurut Todaro (2006), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar.

Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2009).

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah daerah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah, dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Pengeluaran Pemerintah Dilihat dari Belanja Tidak Langsung

Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak digunakan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja pemeliharaan. Anggaran belanja tidak langsung memegang

peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas yang pada gilirannya akan tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

Belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sementara itu, belanja pegawai yang dimaksud dalam rincian belanja tidak langsung ini adalah belanja yang digunakan untuk memberi gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil, penghasilan dan tunjangan bagi anggota DPRD yang ditetapkan sesuai undang-undang dan tambahan penghasilan lainnya dengan persetujuan DPRD.

Pengeluaran Pemerintah Dilihat dari Belanja Langsung

Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja langsung adalah belanja yang digunakan oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Belanja langsung ini merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran pembangunan daerah ditujukan untuk membiayai program-proram pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi.

Belanja langsung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Untuk belanja pegawai yang dimaksud dalam rincian belanja langsung yaitu belanja yang dikeluarkan dalam bentuk upah yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto, 1993) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi

pemerintah terhadap total investasi lebih besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.

Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Sedangkan menurut Peacock dan Wiseman (Mangkoesoebroto, 1993) mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Teori Peacock dan Wiseman mengemukakan bahwa perkembangan ekonomi akan menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Pendapat Peacock dan Wiesman yang mengemukakan adanya peran pemungutan pajak dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah didukung oleh teori Erick Lindahl. Lindahl berpendapat bahwa penyediaan

infrastruktur dilakukan pemerintah melalui pemungutan pajak kepada semua masyarakat yang berstatus wajib pajak dengan porsi yang sama. Namun, untuk mengantisipasi ketidakpuasan masyarakat dengan tarif pajak yang diberlakukan untuk ketersediaan infrastruktur maka pemerintah memberlakukan tarif pajak sesuai dengan kemampuan masyarakatnya. Meskipun, dengan tarif pajak yang diberlakukan kepada masyarakat berbeda-beda tapi pemerintah berharap penerimaan dari pajak tetap sama dengan pemberlakukan tarif pajak yang sama kepada masyarakatnya.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, data yang diteliti adalah data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sumber data juga berasal dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan khususnya pada tahun 2007 sampai tahun 2011, data yang diteliti meliputi realisasi total pengeluaran pemerintah, belanja tidak langsung dan belanja langsung kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan time series dan cross section. Data time series periode tahun 2007-2011 sedangkan data cross section adalah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kuantitatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretaris Daerah Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, dan Direktorat Jendral Perimbangan

Keuangan dengan mengambil seluruh populasi yaitu sebanyak 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Analisis Panel Data

Menurut Gujarati (2010), data panel (pooled data) atau yang disebut juga data longitudinal merupakan gabungan antara data cross section dan data time series. Data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data time series merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Menurut Ajija, dkk (2011) ada tiga metode yang digunakan untuk mengestimasi data panel yaitu: Model Pooled Least Square (Comon Effect), model ini dikenal dengan estimasi Comon Effect yaitu teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Model Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect), Pada metode Fixed Effect estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (no weight) atau Least Square Dummy Variable (LSDV) dan dengan pembobot (cross section weight) atau General Least Square (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit cross section (Gujarati, 2010). Model Pendekatan Efek Acak (Random Effect), Dalam model efek acak, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukan ke dalam error. Karena hal inilah, model efek acak juga disebut model komponen error (error component model).

Spesifikasi Model Regresi

Secara ekonometrika hubungan antara pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan sebagai berikut ini:

$$GRWT = \alpha_i + \beta_1 \log BTL_{it} + \beta_2 \log BL_{it} + uit$$

Dimana:

GRWT : Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

$\log BTL$: Pengeluaran Pemerintah Yang Dilihat Dari Belanja Tidak Langsung (Jutaan

Rupiah)

$\log BL$: Pengeluaran Pemerintah Yang Dilihat Dari Belanja Langsung (Jutaan Rupiah)

α_i : Konstanta

β_1 dan β_2 : Koefisien regresi untuk masing-masing variabel

u : Residual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penaksiran Model

Redundant Fixed Effect–Likelihood Ratio, Pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih model terbaik antara model common effect model dengan fixed effect model. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai probabilitas Cross-Section Chi-Square sebesar 0,0000 dan signifikan terhadap alpha 5% sehingga dapat diputuskan bahwa model yang dipilih menggunakan fixed effect.

Correlated Fixed Effect–Hausman Test, Pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih model yang terbaik antara fixed effect model dengan random effect model. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa probabilitas Cross-section random sebesar 0,2524 dan tidak signifikan dengan alpha 5% sehingga dapat diputuskan model yang dipilih adalah dengan menggunakan fixed effect.

Selain serangkaian uji tersebut, pemilihan model juga dilakukan dengan melihat uji goodness of fitnya. Uji goodness of fit selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3
Hasil Estimasi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah

Variabel Dependen : GRWT	Model		
	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
KONSTANTA	3.070907	-0.452043	2.298239
Standar error	1.046166	1.649232	2.859143
Probabilitas	(0.0038)**	(0.7844)	(0.4226)
LOGBTL	-0.047288	0.291399	0.070378
Standar error	0.095002	0.144940	0.230521
Probabilitas	(0.6193)	(0.0463)**	(0.7605)
LOGBL	0.197925	0.117470	0.131951
Standar error	0.066876	0.057229	0.122075
Probabilitas	(0.0035)**	(0.0420)**	(0.2813)
R²	0.059759	0.866682	0.009994
F Statistic	5.465865	24.92008	0.868124
Probabilitas	(0.004996)**	(0.000000)**	(0.421569)
Durbin-Watson Stat	0.977426	1.823920	1.243516

** : signifikan pada $\alpha = 5\%$

Berdasarkan Uji Spesifikasi Model yang telah dilakukan serta dari perbandingan goodness of fit-nya, maka model regresi yang digunakan dalam mengestimasikan pengaruh pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung (logBTL) dan belanja langsung (logBL) terhadap pertumbuhan ekonomi (GRWT) di Jawa Tengah adalah fixed effect model. Dipilihnya fixed effect model karena model ini memiliki standar error yang lebih kecil daripada random effect model sehingga akan menyebabkan standar errornya lebih efisien. Selain itu, probabilitas masing-masing variabel independen dari fixed effect model lebih signifikan daripada random effect model yang masing-masing variabel independennya tidak signifikan semua sehingga model yang lebih baik yaitu fixed effect model.

Data regresi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2007-2011 dengan fixed effect model dan metode GLS, diperoleh nilai koefisien regresi untuk setiap variabel penelitian dengan persamaan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{GRWT} &= \beta_0 - \beta_1 \log BTL_{it} + \beta_2 BL_{it} + e_{it} \\
 \text{GRWT} &= -0.452043 + 0.291399 \log BTL_{it} \\
 &+ 0.117477 \log BL_{it} + e_{it} \\
 \text{Std Error} & (1.649232)(1.44940)(0.057229) \\
 \text{Sig} & (0,7844)(0.0463)(0,0420)
 \end{aligned}$$

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien positif sebesar 0.291399 terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2007 sampai 2011. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung mengalami peningkatan sebesar 1 %, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sebesar 0.291399%.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gede Dwi Purnama Putra dan I Made Adigorm (2011) yang menjelaskan bahwa belanja tidak langsung dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jumlah pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung yang tinggi akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Jumlah pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung ini memang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat, namun dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung ini dapat memberikan dampak melalui pelayanan publik yang dilakukan pegawai pemerintah kepada masyarakat. Adanya pelayanan ini diharapkan dapat memperlancar proses kegiatan

ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Belanja Langsung terhadap Perumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pengeluaran pemerintah untuk belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0.117477 terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah tahun 2007 sampai tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah untuk belanja langsung mengalami peningkatan sebesar 1 %, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sebesar 0.117477%. Hasil ini juga dikemukakan oleh Jamzani Sodik (2007) yang menemukan adanya pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian Jamzani Sodik ini pengeluaran pembangunan sama dengan belanja langsung karena kegunaannya sama-sama untuk memperbaiki infrastruktur atau fasilitas publik.

Selain itu, I Gede Dwi Purnama Putra dan I Made Adigorim (2011) juga mengadakan penelitian yang menjelaskan bahwa belanja langsung dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk belanja langsung yang terjadi pada kabupaten/kota di Jawa Tengah sebenarnya sangat baik karena peningkatan ini menandakan bahwa pemerintah masing-masing kabupaten/kota peduli akan perbaikan infrastruktur. Dengan infrastruktur yang baik maka diharapkan dapat memperlancar kegiatan ekonomi yang ada di Jawa Tengah sehingga secara langsung akan meningkatkan persentase pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kemudian hasil penelitian ini juga sesuai dengan Teori Rostow dan Musgrave yang menyatakan pada tahap pembangunan diperlukan investasi pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam penelitian ini investasi pemerintah yang dimaksud yaitu pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja langsung.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi di atas, variabel pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2011. Hal ini dibuktikan dengan Probabilitas fixed effect model diperoleh nilai Fhitung sebesar 24.92008 dengan probabilitas 0,000000. Sementara itu, dengan nilai Ftabel sebesar 3,04 maka Fhitung > Ftabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung (logBTL) dan belanja langsung (logBL) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (GRWT) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 sampai tahun 2011.

Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung yang meningkat akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Meskipun pada pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena proses distribusi pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung ini kepada masyarakat dilakukan melalui pelayanan publik yang dilakukan pegawai pemerintah. Pelayanan publik ini, seperti pelayanan perizinan investasi, pelayanan perpanjangan surat-surat dan lainnya. Sementara itu, dengan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk belanja langsung maka porsi untuk pembangunan infrastruktur akan semakin besar. Adanya pelayanan publik yang semakin baik dan tersedianya infrastruktur yang memadai diharapkan dapat memperlancar proses kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah.

SIMPULAN

Berdasarkan uji t-statistik (uji parsial) didapatkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk

belanja tidak langsung mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pengeluaran pemerintah untuk belanja langsung mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uji F-statistik (uji simultan) didapat bahwa pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

SARAN

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah daerah sebaiknya BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) lebih memperbesar porsi belanja langsung yang bersifat publik seperti pengeluaran pembangunan untuk pendidikan dan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain, diperlukan manajemen yang baik dalam pengelolaan anggaran pemerintah masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dengan meningkatnya belanja tidak langsung dan belanja langsung tiap tahunnya maka akan meningkatkan juga kegiatan ekonomi karena pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah akan lancar dan infrastruktur yang tersedia, misalkan pelayanan perizinan, pelayanan perpanjangan surat-surat dan pelayanan pembuatan fasilitas publik lainnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah.

PENUTUP

Kesimpulan

Temanggung merupakan wilayah yang terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Tengah. Wilayah Temanggung secara geoekonomis dilalui oleh jalur pusat Kegiatan ekonomi yaitu Semarang, Yogyakarta dan Purwokerto serta potensi wisata dan alamnya membuat peluang UMKM untuk berkembang semakin besar.

Namun dengan akan segera diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2 tahun lagi akan tercipta pasar tunggal di wilayah ASEAN. MEA ini akan membawa dampak positif dan negatif terhadap UMKM yang ada. Untuk menghadapi dampak negatif yang ada, perlu adanya strategi salah satunya adalah melalui keunggulan komparatif yaitu dengan menciptakan produk yang berbeda dan khas serta menciptakan pelayanan yang baik dan khas.

Saran

Dengan melihat adanya peluang dan potensi untuk pengembangan UMKM di Temanggung, maka seharusnya pemerintah kabupaten Temanggung lebih intensif lagi dalam mendorong perkembangan UMKM. Selain itu para pelaku UMKM perlu melakukan inovasi dan pengembangan produk-produknya agar dapat bersaing dalam pasar bebas MEA 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul R,dkk. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat
- Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik. 2008. Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2008. Jawa Tengah: BPS.
- Bastian, Indra, Ph. D., M.B.A.,Akt. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
- Berita resmi statistik BPS Indonesia. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2007. No. 10/02/Th. XI, 15 Februari 2008
-
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008. No. 11/02/Th. XII, 16 Februari 2009
-
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011. No.13/02/Th. XV, 6 Februari 2012
- Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2008-2011 dalam Publikasi Online Badan Pusat Statistik tentang Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Indonesia

- Tahun 2008-2011.(<http://pemalangkab.bps.go.id/index.php/jadwal-kegiatan/86-demo/publikasi-online-bps-ri/100-publikasi-produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-2007-2011>). Diakses tanggal 26 Desember 2012.
- Gujarati, D.N. dan D.C. Porter. 2010. Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Indrawat, Budi. 2007. "Peranan Pengeluaran Pemerintah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Era Orde Baru Dan Era Reformasi". *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2007: 365-382.
- Irawan dan Suparmoko. 1992. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ma'ruf, Ahmad dan Latri Wihastuti. 2008. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan Dan Prospeknya". *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Volume 9, Nomor 1, April 2008: 44 - 55.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Nurudeen, Abu Dan Abdullahi Usman. 2010. "Government Expenditure And Economic Growth In Nigeria, 1970-2008: A Disaggregated Analysis". *Business and Economics Journal*, Volume 2010. BEJ-4: 1-11. Department of Economics, University of Abuja, PMB 117, Nigeria.
- Nworji, Ifeanyi Desmond; Andy Titus Okwu; Obiwuru Timothy C. Dan Lucy Odiche Nworji. 2012. "Effects Of Public Expenditure On Economic Growth In Nigeria: A Disaggregated Time Series Analysis". *International Journal Of Management Sciences And Business Research*, 2012, Vol. 1, Issue 7: 1-15 (ISSN: 2226-8235).
- Prasetyo, P.Eko. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Putra, I Gede Dwi Purnama Dan I Made Adigorim. 2011. Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Universitas Udayana, Bali. Vol. 1, No. 2, Desember 2012.
- Rahayu, Siti Aisyah Tri. 2004. "Peranan Sektor Publik Lokal Dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Wilayah Surakarta (1987-2000)". *Jurnal Kinerja*, Volume 8, No.2, Th. 2004: Hal. 133-147. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Realisasi Total Pengeluaran Pemerintah 6 Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2007-2011 dalam: www.dpjk.depkeu.go.id
- Realisasi Total Pengeluaran Pemerintah 35 Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah Tahun 2007-2011 dalam: www.dpjk.depkeu.go.id
- Sodik, Jamzani. 2007. "Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 12, No 1, April 2007: Hal 27-36, UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Swaramarinda, Darma Rika Dan Susi Indriani. 2011. "Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia". *Jurnal Econo Sains*, Volume IX, Nomor 2, Agustus 2011: 95-105. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- Todaro, M.P. dan Smith S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

